

86

Dialog Nasional Menyelaraskan Persepsi Mengenai Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

(Oleh : Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo)

1. Suatu Forum Dialog Nasional penyerasian pandangan dan sikap para Penyelenggara Pemerintah Negara Tingkat Tinggi (Nasional) baik dari Eksekutif maupun Legislatif mengenai Visi dan Misi Negara Bangsa dan penyerasian persepsi/lebih adanya kesaling pengertian mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejak tahun 1997 terjadi perubahan-perubahan besar yang disebut dengan Reformasi. Perubahan besar ini terjadi karena adanya krisis moneter yang meluas menjadi krisis multidimensi. Terjadi koreksi terhadap Orde Baru.

Orde Baru bukan tanpa hasil bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa terutama dalam mengatasi krisis politik dan ekonomi di tahun 1965/1966. Tetapi juga mempunyai kekeliruan yang menjerumuskan di-masa-masa akhir kekuasaannya. Tidak diterapkannya Good Governance serta

merajalelanya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Juga pemerintahan yang kemudian cenderung merupakan "autocratic bureaucratic polity". Konsentris patrimonial menjadi sumbat demokrasi.

Secara khusus pengelolaan utang sektor swasta jangka pendek oleh sektor perbankan yang kropos. Konglomerasi yang over expansion secara tidak sehat. KKN meruak.

Pada dasarnya tidak Good Governance, Akuntabel, amanah.

Mengapa perlu dibentuk forum dialog itu, karena perubahan besar yang terjadi, terutama adalah dalam hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Apabila dimasa lalu Eksekutif dipandang terlalu kuat, otokratik, maka pada masa reformasi terjadi kegoncangan hubungan yang saling menghantam, akibat kekurangan persamaan persepsi dalam visi, misi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu diletakkan pada ke-

seimbangan hubungan antara lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif.

Dalam Reformasi tujuan utamanya adalah pengembangan masyarakat (baik institusi, proses dan budaya) demokrasi salah satu pilar membangun masyarakat madani. Dalam rangka itu cara pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah berdasarkan Good Governance. Ini berarti bahwa governance dari pembangunan negara dan seluruh masyarakat bangsa harus dilakukan secara "sharing" bersama-sama sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sendiri.

Dengan itu sungguh perlulah adanya kesamaan persepsi visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sehingga dapat dikembangkan sistem "checks and balances".

Dewasa ini dalam eforia reformasi mengemuka semangat "dissent" yang kental.

Semua ini bukan berarti terjadi uninformisasi/penyeragaman, Demokrasi, Masyarakat Madani dan Good Governance perlu tetap membudayakan penerimaan terhadap keberagaman (pluralisme) tetapi bukan pertentangan dan perpecahan yang mengarah pada disintergrasi

bahkan anarki. Perbedaan tetap akan/harus ada dalam ke-rangka pemecahan masalah untuk mencapai tujuan yang sama (bersama).

2. Dalam upaya Reformasi itu ada tiga kondisi dan upaya strategis yang perlu mendapatkan perhatian

1) Mempertegas visi dan misi kita sebagai bangsa, meningkatkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai landasan bagi perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

2) Memperkuat kehidupan dan lembaga-lembaga demokrasi dalam rangka mewujudkan Masyarakat Madani dan terselenggaranya Good Governance.

MM merupakan paradigma dan sistem peradaban yang mengindahkan kemajemukan, menuntut tegaknya supremasi hukum serta keadilan dalam kehidupan bersama, dan mendorong pengembangan Iptek, yang

dilandasi keimanan dan ketaqwaan.

- 3) Pemulihan Ekonomi untuk mencapai kondisi perekonomian yang memiliki ketahanan dan daya saing tinggi serta berkeadilan sosial, terutama dalam menghadapi persaingan global yang juga berlangsung dalam kehidupan perekonomian lokal. Terbangunnya perekonomian nasional yang berkeadilan sosial harus tetap merupakan komitmen seluruh penyelenggara negara.

2. Dalam Proses Reformasi itu, sebagai Bangsa dalam Negara Bangsa Indonesia kita telah menetapkan bersama beberapa keputusan mendasar

- 1) Pertama adalah mengenai perubahan-perubahan atau amandemen pertama UUD 1945. Yang paling utama ialah kekuasaan Presiden, dan memberikan kekuasaan lebih kepada DPR dalam bentuk Undang-undang.

Misalnya pasal 5 "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR" diganti "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR".

Ayat kedua "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" malah dihapus.

Berbagai hak Prerogatif Presiden sekarang harus dengan memperhatikan pertimbangan DPR atau Mahkamah Agung.

- 2) Kedua adalah Amandemen Kedua UUD 1945. Beberapa hal penting amandemen kedua adalah ketentuan-ketentuan tentang Otonomi Daerah. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (jadi tidak ada pengangkatan). Fungsi-fungsi DPR legislasi, anggaran dan pengawasan dan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat dan lain-lain dan yang sangat penting pasal-pasal

tentang Hak Azazi Manusia.

- 3) Ketiga adalah Visi dan Misi bernegara, bermasyarakat dan berbangsa ini sudah dituangkan dalam GBHN TAP MPR No. IV/1999.

Ini bisa diawali dengan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945 "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,

berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

MISI

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut :

Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

Penjamin kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.

Perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran;

Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Kalau saya "mampu memafaatkan globalisasi".

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian

utama pada pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

- 4) Keempat adalah Tujuan-tujuan Reformasi Pembangunan seperti

tercantum dalam TAP
MPR No. X/1998 dan
tentang
penyelenggaraan
negara yang bebas
KKN dalam TAP
MPR No. XI/1998.

Disini saya rumuskan
dengan bahasa saya :
Mengatasi krisis
ekonomi, terutama
untuk menghasilkan
stabilitas moneter
yang tanggap
terhadap pengaruh
global dan pemulihan
aktivitas usaha
nasional (sektor riil)
menumbuhkan
kembali ekonomi
makro Indonesia,
dengan pertumbuhan
yang memadai,
melalui peningkatan,
investasi dan ekspor.
Tetap memberi
perhatian untuk
pemberdayaan
ekonomi rakyat dan
pengentasan
kemiskinan. Upaya
terus menerus kearah
penyelenggaraan
pemerintahan yang
bebas KKN.
Menumbuh
kembangkan
kehidupan dan
budaya demokrasi,
dalam tataran dan
proses institusional,
konstitusional dan
demokratis.

Meningkatkan
perluasan dan
peningkatan
partisipasi politik
rakyat secara tertib
dan berdasar hukum.
Menindak tegas
tindakan anarki, anti
HAM dan anti
demokrasi.
Menegakkan hukum
berdasar nilai-nilai
kebenaran dan
keadilan, HAM
menuju terciptanya
ketertiban dan
kepastian dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara.
Mengembangkan
wacana dan dialog
serta kelembagaan
antar SARA dalam
kehidupan sosial
budaya dalam usaha
mewujudkan
masyarakat madani.
Masyarakat yang
lebih menerima dan
menghargai
keberagaman.
Kembali
mengutamakan nilai-
nilai kebersamaan
Pancasila dalam
Negara Bangsa
Indonesia.
Ini kemudian bisa
dirumuskan dalam
Agenda
Pemerintahan.
Misalnya soal

mengatasi krisis bisa dipilah-pilah.

Restrukturisasi sektor perbankan. Ini

memang aneh, disatu pihak sektor ini keropos dan banyak yang invalid, tetapi dilain pihak perbankan ini ya jantung untuk ekonomi. Jadi jelek tetapi harus diperbaiki/disehatkan

Kemudian kebijaksanaan dan pengelolaan APBN (terutama masalah subsidi dan bantuan luar negeri).

4. Sebagai tantangan Pembangunan Bangsa yang demikian juga merupakan Tujuan Pembangunan Masyarakat Bangsa saya rumuskan dengan mengambil pendapat Sdr. Mustopadidjaja juga sebagai berikut :

Tantangan Pembangunan Bangsa.

Membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat Madani/Warga. Peradaban multikultural, yang (membangun institusi, proses dan budaya) demokratis, lebih tegaknya supremasi hukum dan pengindahan HAM, berjalannya ekonomi pasar yang berkeadilan untuk meningkatkan ketahanan

ekonomi dan daya saing, pembangunan kesejahteraan umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hidup keberagaman beragama yang inklusif, masyarakat berpengetahuan, rasional, menguasai (alih) teknologi.

Yang sebenarnya sama dengan masyarakat Pancasila sesuai cita-cita para pendiri Bangsa. Dengan prinsip-prinsip Ketuhanan (Yang Maha Esa), Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan/Demokrasi dan Keadilan (Sosial) Masyarakat yang saling menerima dan saling menghargai keberagaman dan bersama membangun masyarakat sejahtera.

5. Dialog Nasional para Penyelenggara Pemerintahan Negara Tingkat Tinggi (Nasional). Dimaksudkan untuk para Pejabat Tinggi Negara dan Pejabat Eselon I dilembaga Eksekutif dan Legislatif. Visi program adalah : Terwujudnya kenegarawanan dari para Penyelenggara Negara Tingkat Tinggi.

Misi Program adalah :

- 1) Penyerasian persepsi dalam proses kebijakan politik/nasional, antara politisi

dengan birokrat tingkat tinggi.

- 2) Penyesuaian langkah dalam pengindentifikasian berbagai masalah nasional yang penting dan sedang dihadapi serta menemukan cara penyelesaiannya.
- 3) Pengembangan kemampuan berpikir secara nasional dalam semangat persatuan.
- 4) Pengembangan kemampuan berpikir yang inovatif, problem solving, sistemik dan holistik.

6. Dalam Dialog Nasional tidak dilakukan ceramah-ceramah. Apabila perlu disediakan Narasumber. Dialog dilakukan dengan Moderator dari peserta dialong sendiri. Dialog dilakukan berdasar topik-topik aktual penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara bangsa. Disediakan bahan-bahan referensi tentang perubahan UUD. TAP MPR No. IV/1998. TAP MPR No. X dan XI/1998, referensi tentang analisa Kebijakan Publik, Good Governance.

Topik-topik yang disarankan antara lain adalah :

- 1) Mengatasi disintegrasi bangsa : Mencari Format Baru Sistem Integrasi Nasional;
- 2) Membudayakan tata nilai dan budaya yang kondusif untuk membangun Masyarakat Madani yang Demokratis, Kompetitif dan menguasai Iptek.
- 3) Recoveri Perekonomian Nasional : Mencari Format Baru Sistem Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Nasional, Agenda kebijakan dan program rekovery ekonomi.
- 4) Membudayakan supremasi hukum, penegakkan hukum sebagai dasar disiplin bangsa.
- 5) Etika Politik, Administrasi dan Kebijakan dalam Birokrasi Pemerintahan, Etika Bisnis, Social responsibility dari bisnis.
- 6) Daya Saing Nasional : Membangun

- Kapasitas Saing Bangsa Dalam Era Globalisasi.
- 7) Hak Asasi Manusia : pemahaman, penghayatan dan pengamalan serta penghormatan terhadap hak-hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Negara.
 - 8) Sumber Daya Manusia : mencari format baru Pembinaan Jiwa Korsa, Etos Kerja yang berorientasi Kompetensi dan Profesionalisme Kenegarawanan.
 - 9) Sistem Informasi Manajemen : Membangun Budaya Information Technology dalam Modernisasi Birokrasi; E. Government ?
 - 10) Public Service : Optimasi Pelayanan Publik.
 - 11) Desentralisasi : Mencari format baru dalam hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat, propinsi dan daerah.
 - 12) Pengembangan BUMN : Penataan Peran dan Fungsi BUMN dalam dimensi perekonomian dan pembangunan nasional.
 - 13) Reposisi TNI dan Polri dalam Sistem Penyelenggaraan Negara : mencari Format baru – Identifikasi Militer sebagai Bhayangkara Negara.

Jakarta, 24 Januari 2002

(Diambil dari bahan
Penasihat Ahli KAPOLRI)

